

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan wahana transformasi pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk pengembangan pribadi dalam mencapai kematangan dan kedewasaan. Pendidikan tidak hanya mengembangkan ilmu, teknologi dan keterampilan, melainkan juga mengembangkan aspek-aspek lainnya, seperti kepribadian, nilai-moral dan etika. Oleh karena itu pendidikan memainkan dua fungsi utama yaitu pertama *fungsi kecendekiawanan* dan kedua *fungsi pembudayaan*. Fungsi pertama berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan, sedangkan fungsi kedua lebih menekankan kepada penanaman nilai-moral dan etika. Kedua fungsi itu seyogyanya berjalan harmonis dan seimbang tidak boleh berat sebelah. Harmonisasi kedua fungsi pendidikan itu merupakan harapan dan tugas Pendidikan Umum.

Pendidikan Umum diperlukan bagi setiap orang karena memiliki sasaran yang sangat luas dan mendasar yaitu pembentukan manusia seutuhnya. Aspek mental yang dikembangkan dalam pendidikan umum yakni keseimbangan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Pendidikan umum bertujuan membina manusia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki keseimbangan antara kemampuan pikir, kesadaran dan keterampilan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh R.O Hand dan D.B. Bidna dalam Nursid Sumaatmadja (1990 : 2) bahwa tujuan pendidikan umum merupakan "*the making of complete man*".

Dalam dunia pendidikan di Indonesia, pembinaan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dilandasi dan ditujukan kepada sosok manusia yang diharapkan seperti digambarkan dalam GBHN 1993, sebagai berikut :

.....manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur , berkepribadian, berdisiplin, kerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani, cinta tanah air, tebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial, percaya kepada diri sendiri serta sikap dan perilaku yang inovatif, kreatif, manusia pembangunan yang mampu membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Sedangkan konsepsi manusia seutuhnya menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 adalah bahwa :

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmanai dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dengan demikian tujuan pendidikan nasional memberikan isyarat bahwa peserta didik yang diupayakan melalui pendidikan nasional, selain cakap dan ahli dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditekuninya, juga harus dilandasi dan diarahkan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan nasional ingin mewujudkan sosok manusia pembangunan berkualitas yang harmonis dalam fungsinya sebagai makhluk Tuhan, sosial dan individu, yang memiliki sikap dan wawasan kehidupan yang serasi dan seimbang. Jadi kecenderungan dari rumusan tujuan pendidikan nasional ini, ingin mengsenapkan iman, taqwa dan kebudayaan dalam realita integral manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini mengandung implikasi perlunya dilakukan upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan diharapkan bangsa Indonesia, adalah sumber daya manusia yang tidak hanya berkualitas dari segi penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), melainkan juga berkualitas dari segi mental spiritual Iman dan Takwa (IMTAK), moral, dan etika. Artinya penguasaan IPTEK tersebut tidak akan berarti apabila tidak didukung iman dan taqwa, sikap dan perilaku yang baik, serta berpegang teguh kepada kepribadian bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai luhur Pancasila.

Dalam kaitan ini, Nu'man Somantri (1996), berpendapat bahwa sumber daya manusia yang bermutu adalah sumber daya manusia yang tidak hanya mampu dan betahan hidup dalam masa perubahan, berorientasi nilai budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga beradab dan beriman. Hal ini berarti bahwa manusia Indonesia seutuhnya tidak hanya berorientasi IPTEK dan mampu berpikir secara sistematis dan canggih melainkan terutama juga harus beradab, sopan santun, berdisiplin, rasa tanggung jawab, tenggang rasa dan beriman.

Sejalan dengan itu, Ahmad Sanusi (1994) mengemukakan bahwa :

“...yang merupakan tantangan terhadap pendidikan sekarang ini ialah bagaimana mendidik anak agar bukan saja memiliki kemampuan fisik untuk mampu bekerja keras, akan tetapi memiliki kelembutan perilaku dan sikap arif sebagai orang penyabar. Memiliki kelembutan perilaku dan sikap arif adalah merupakan tujuan dari pendidikan nilai”.

Berdasarkan pemikiran di atas, guna membantu generasi muda bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-moral-norma dan etika masyarakat, maka untuk memenuhi tuntutan tujuan pendidikan nasional seperti digambarkan di atas, kepada mereka perlu diupayakan suatu program pendidikan yang bisa membawa diri mereka

menjadi warga negara yang baik yang menyadari hak dan kewajibannya. Hal ini penting mengingat sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, sangat strategis dapat membantu *mentransmisi* dan *mentransformasikan* nilai-moral, norma, etika, sosial dan budaya kepada generasi muda, yang pada dasarnya bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara secara keseluruhan. Program pendidikan yang dimaksud adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Keberadaan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Umum, dapat dilihat pada pasal 39 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa : isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat (a) Pendidikan Agama, (b) Pendidikan Pancasila, (c) Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya dijelaskan bahwa pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengarahkan perhatiannya pada nilai-moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan isi kelima sila Pancasila, yakni perilaku yang memancarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, mendukung persatuan bangsa, dalam masyarakat yang beraneka ragam kepentingan, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan atas dasar musyawarah untuk mufakat serta mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Kurikulum SMU : 1994).

Dengan demikian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Umum, menjadi ciri budaya dan pola pikir yang tumbuh dari kebutuhan pendidikan nasional. Karena di dalamnya terkandung pesan edukatif dan psikologis

untuk membawa generasi muda Indonesia supaya berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil dan mandiri didasari iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan sebagai program pendidikan politik di tingkat persekolahan, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus mampu membina peserta didik menjadi manusia Indonesia yang melek politik (*political literacy*), memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Sehingga menempatkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada posisi sentral dan strategis.

Dalam kaitan ini, A. Kosasih Djahiri (1996 :19) mengemukakan bahwa :

“salah satu misi pokok Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah pendidikan politik, dalam pengertian pembinaan siswa sebagai anak manusia Indonesia, maupun menjadi warga negara, masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang berkepribadian Pancasila dan UUD 1945 yang melek politik. Warga negara yang *melek politik* adalah warga negara Indonesia yang berkepribadian Pancasila, *melek hukum dan konstitusi (1945)*, *melek kehidupan berbangsa dan bernegara*, *melek masalah* dan mau serta mampu berkontribusi memecahkan masalah sesuai dengan fungsi peran harapannya”.

Sementara Abdul Azis Wahab (1996), dalam Pidato pengukuhan jabatan guru besar tetap dalam ilmu pendidikan pada jurusan PMP KN dan Hukum FPIPS IKIP Bandung 18 Oktober 1996, menegaskan bahwa :

“Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk *pendidikan politik*, yang tujuannya membentuk warga negara yang baik, yaitu warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga negara memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, maupun memecahkan masalah-masalahnya sendiri dan juga masalah-masalah kemasyarakatan secara cerdas sesuai dengan fungsinya dan perannya (*socially sensitive, socially responsible dan socially intelligence*). Selain itu sebagai warga negara Indonesia yang baik ia juga diharapkan memiliki sikap disiplin pribadi, maupun berpikir kritis, kreatif dan inovatif, agar dicapai kualitas pribadi dan perilaku warga negara dan warga masyarakat yang baik (*socio civic behavior dan desirable personal qualities*).

Mengacu pada kedua pendapat di atas, hal ini menunjukkan betapa pentingnya dilakukan pendidikan politik di tingkat persekolahan, yang tertuang dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mengingat target harapan dan misi utama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah memanusiakan dan mendewasakan serta mengembangkan anak manusia secara utuh paripurna berlandaskan nilai-moral dan norma Pancasila, agama dan budaya luhur bangsa. Sehingga dikemudian hari diharapkan akan lahir suatu generasi manusia Indonesia Pancasila sejati, dalam tatanan kehidupan budaya Pancasila, yakni generasi yang memiliki pola pikir, zikir dan sikap perilaku yang selalu berpijak atas nilai-moral Pancasila.

Sebagai salah satu program pendidikan yang wajib dipelajari oleh semua siswa di semua jenjang dan tingkat pendidikan di Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan umum, mengemban tugas dan misi yang tidak ringan dalam rangka turut menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bertanggung jawab, terlebih lagi dalam era globalisasi. Sebab ia merupakan salah satu wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Kurikulum SMU 1994).

Derasnya arus globalisasi sebagai salah satu fenomena dari kemajuan IPTEK, mendorong perubahan yang drastis dalam tata kehidupan umat manusia. Sebagai sebuah fenomena kehidupan, tentu globalisasi membawa nuansa-nuansa positif dan negatif sekaligus. Dengan kata lain globalisasi di samping membawa harapan-harapan

baru, memunculkan pula masalah dan tantangan baru. *Dalam arti positif*, globalisasi memberi harapan akan kecenderungan yang lebih universalistik, dimana umat manusia dapat lebih saling mengenal sehingga menyebabkan manusia seakan-akan hidup dalam dunia tanpa batas (*borderless world*), dan mampu menerobos dinding geografis, melalui arus informasi yang deras dan dahsyat. *Dalam arti negatif*, globalisasi menimbulkan ancaman terhadap ideologi dan integritas suatu bangsa. Bahkan pada tingkat yang lebih riskan, globalisasi bukan saja menimbulkan ancaman budaya, akan tetapi juga menimbulkan implikasi yang cukup serius bagi kehidupan politik, yang pada gilirannya akan membawa ancaman terhadap kedaulatan suatu bangsa.

Disinilah pentingnya pendidikan dan pembinaan nilai-moral Pancasila kepada peserta didik, agar dihayati dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat modern. Sehingga kemajuan IPTEK yang diperlukan untuk membangun masyarakat modern, tetap berkembang berlandaskan nilai-moral dan kepribadian bangsa sendiri. Oleh karenanya yang penting adalah bagaimana melahirkan gagasan, pemikiran, dan ide yang dapat dijadikan masukan dalam pembentukan pola pendidikan politik sebagai model pendidikan nilai-moral, yang dapat menuntun generasi muda harapan bangsa untuk tidak kehilangan karsa, idea, dan arah untuk merambah masa depan serta siap menghadapi tantangan dan rintangan berat yang menghadang. Dengan berbekal pengetahuan tentang hal itu, maka dapat diharapkan mereka dengan penuh kesadaran mampu memberikan partisipasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara optimal.

Menyimak keterkaitan antara sasaran program pendidikan umum dengan pendidikan politik/pendidikan nilai moral di atas, maka dapat dikatakan bahwa

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran sebagai pendidikan politik/pendidikan nilai-moral merupakan wahana pengembangan pendidikan umum di tingkat persekolahan (Pasal 39 USPN). Oleh sebab itu, sepantasnya kalau masalah penerapan konsep pendidikan politik dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran sebagai Pendidikan Umum, mendapat perhatian untuk ditelaah lebih jauh dari apa yang terjadi saat ini, terutama di tingkat Sekolah Menengah Umum, yang para peserta didiknya sedang mengalami banyak perubahan baik fisik maupun emosi. Pada umumnya mereka ditandai dengan karakteristik ; usia puber diwarnai masa pancaroba, selalu ingin mencoba hal-hal yang baru, bersifat heroik, senang menyerempet hal-hal yang membahayakan, dan masih mencari identitas dirinya sendiri untuk diterima lingkungannya. Sedangkan SMU yang akan dijadikan obyek penelitian ini, yaitu SMU Negeri I Sumedang.

Dipilihnya SMU Negeri I Sumedang sebagai lokasi penelitian, karena sekolah ini memiliki tingkat kedisiplinan dan ketertiban yang tinggi didasari sikap saling menghargai dan mengomati diantara semua pihak warga sekolah. Sehingga suasana demokratis dan kekeluargaan dirasakan di lingkungan sekolah ini. Di sekolah ini nyaris tidak ditemukan kasus kenakalan remaja di lingkungan sekolah seperti penggunaan obat terlarang, minuman keras ataupun perkelahian massal. Para siswanya tampak berpakaian rapi dan berlaku sopan. Suasana lingkungan sekolah yang indah dan bersih ditambah sarana yang memadai, hal ini memungkinkan berlangsungnya suasana belajar mengajar yang baik dan nyaman. Penegakkan disiplin sekolah yang lebih dioperasionalkan lagi ke dalam nilai-nilai ketertiban, kebersihan, keteraturan, ketaatan kesopanan, kebersamaan dan tanggung jawab serta nilai kesetiakawanan sosial, tidak



terlihat cara-cara pemaksaan, melainkan penyelesaiannya tetap dilakukan melalui persuasif, edukatif dan demokratis.

Kecuali itu, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan selain intensif membina nilai-moral melalui kegiatan di kelas juga aktif dalam membina para siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler. Sehingga terciptanya kondisi yang kondusif dalam pembinaan nilai-moral di sekolah ini, kemungkinan besar disebabkan karena dilakukannya pembinaan nilai-moral dan pendidikan politik yang cukup intensif di sekolah ini. Guru menempati kedudukan yang penting dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Karena gurulah yang menghubungkan pelajaran dengan kebutuhan siswa, sehingga nilai-nilai yang terdapat dalam pelajaran dapat diinternalisasikan dalam diri siswa. M.I. Soelaeman (1985 : 19) mengemukakan bahwa “dalam peranannya guru berusaha menyampaikan gagasan dan informasi, melatih keterampilan dan membina sikap tertentu kepada siswa-siswanya”.

Dilatarbelakangi oleh pemikiran tentang pentingnya pemberdayaan pendidikan politik dalam mengembangkan kepribadian peserta didik di tingkat persekolahan menengah dan gambaran pelaksanaan pendidikan politik/pendidikan nilai-moral di SMU Negeri I Sumedang, maka persoalan yang muncul untuk segera dipecahkan adalah tentang penerapan konsep pendidikan politik dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMU Negeri I Sumedang.

## **B. Masalah penelitian**

Pada hakekatnya setiap program pendidikan di Indonesia mengemban misi pembudayaan nilai-nilai Pancasila agar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari

(GBHN 1993). Namun paling tidak Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai peranan yang “lebih” dibanding dengan mata pelajaran yang lainnya, sebab ia secara eksplisit berisikan materi tentang nilai-nilai dari kelima sila Pancasila.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan selalu berupaya membina keutuhan, kebulatan, dan kesinambungan dalam wujud pembinaan konsep nilai dan moral Pancasila. Sehingga terbentuk manusia Indonesia seutuhnya yang serasi, selaras, dan seimbang dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan usaha sadar untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan warga negara Indonesia dengan cara membina dan menanamkan keterampilan dan kemampuan untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila melalui pemberian pemahaman dan penerapan ajaran Pancasila.

Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMU adalah untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan kemampuan memahami, menghayati dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan serta memberi bekal kemampuan untuk belajar lebih baik (Kurikulum SMU 1994).

Perubahan kondisi sosial ekonomi dan perkembangan IPTEK akan berdampak kepada perubahan-perubahan cara berpikir, cara menilai, cara menghargai hidup dan kenyataan, maupun perilaku seseorang. Kesemuanya ini akan berakibat terjadinya

kekaburan nilai-nilai yang ada dan kekaburan dimensi nilai yang sebenarnya selalu ada dalam proses perkembangan dan perubahan masyarakat, maupun dalam pribadi seseorang. Oleh karena itu diharapkan pendidikan nilai-moral dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Di samping itu kecenderungan saat ini, yaitu ditemukannya gejala yang dapat menyangsikan tercapainya tujuan dan misi utama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Karena Proses belajar mengajar lebih bersifat subject matter, hanya menekankan pada aspek kognitif saja. Oleh karenanya sangatlah wajar apabila banyak orang berpendapat bahwa ada kesenjangan antara Pancasila sebagai etika dengan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk menghilangkan kecenderungan seperti itu, dengan harapan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan, harapan dan misinya, seorang guru mutlak haruslah memiliki kemampuan profesional, sosial, dan personal. Sebab kemampuan guru dalam membinakan dan menerapkan nilai-moral Pancasila kepada siswa akan mendorong siswa mengakui dan menghargainya. Sehingga siswa merasa memiliki nilai-moral tersebut dan menjadi bagian dari dirinya. Maka masalah utama yang harus diperhatikan oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu pemahaman yang benar terhadap konsep pendidikan politik /pendidikan nilai-moral dan bagaimana menerapkannya dalam kegiatan belajar mengajar serta membinanya dalam perilaku siswa di lingkungan sekolah.

Oleh karena itu, untuk mengetahui gambaran pemahaman guru PPKN SMU Negeri I Sumedang akan konsep pendidikan politik, bagaimana penerapannya dalam

dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta bagaimana penerapannya dalam moralita perilaku siswa di lingkungan sekolah?. Masalah-masalah tersebut merupakan masalah penting untuk ditelaah secara seksama, dalam upaya membina dan mengembangkan generasi muda melalui pendidikan politik di tingkat persekolahan.

Dengan demikian, maka masalah pokok yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini, berkaitan dengan implementasi pendidikan politik/pendidikan nilai moral di SMU Negeri I Sumedang, yakni mengenai pelaksanaan pendidikan politik dalam pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Umum di SMU.

### **C. Definisi Operasional**

Sebelum merumuskan ruang lingkup penelitian ini, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah dalam rangka definisi operasional, yaitu :

#### **1. Implementasi**

Istilah implementasi (*implementation*) yang berarti pelaksanaan, berasal dari konsep Bloom (1971: 120) dimana untuk melaksanakannya perlu didahului oleh pemahaman akan sesuatu. W. James Popham dan Eva L. Baker (1983 : 40), menjelaskan bahwa “implementasi mencakup digunakannya abstraksi dalam situasi yang khusus dan konkrit”. Abstraksi yang diterapkan dapat berbentuk prosedur, gagasan umum atau metoda yang digeneralisasikan, dapat juga berupa ide atau prinsip, atau teori yang harus dilaksanakan.

Merujuk pada penjelasan di atas, yang dimaksud implementasi dalam penelitian ini, adalah dilaksanakannya/dituangkannya pendidikan politik / pendidikan nilai-moral dalam proses belajar mengajar Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai pendidikan umum di SMU Negeri I Sumedang.

## 2. Konsep

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990 : 456), konsep diartikan : (1) rancangan atau buram surat , (2) ide atau pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa konkrit, (3) gambaran mental dari obyek, proses atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan akal budi untuk memahami hal lain. Dalam kamus Istilah Pendidikan ( 1977 : 250), konsep diartikan sebagai abstraksi atau prinsip yang diturunkan dari fakta berdasarkan eksperimen atau pengamatan.

Merujuk pada pengertian di atas, dalam penelitian ini, konsep diartikan sebagai gagasan, ide, pengertian atau prinsip yang diabstraksikan dari suatu situasi/peristiwa atau suatu istilah yang mempunyai pengertian yang luas, diangkat dari sumber otentik dan dapat dipercaya. Yakni konsep nilai-moral yang bersumber pada nilai dasar Pancasila dan UUD 1945.

## 3. Pendidikan politik

Dalam berbagai literatur ditemukan istilah *political education*, *political socialization* dan *citizenship training* yang digunakan silih berganti. Untuk

penelitian ini ketiga istilah tersebut diterjemahkan sebagai pendidikan politik.

Pendidikan politik dikenal juga sebagai *political forming* atau *politische bildung*. Disebut "*forming*" karena terkandung intensi membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Dan disebut "*Bildung*" (pembentukan atau pendidikan diri sendiri), karena istilah tersebut mengandung pengertian pembentukan diri sendiri dengan kesadaran dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik dan warga negara yang baik.

Pada umumnya pendidikan politik atau istilah dalam ilmu politik disebut "*sosialisasi politik*", difahamkan sebagai "cara suatu masyarakat mentrasfer kultur politiknya dari generasi ke generasi". Dalam pengertian bahwa yang dimaksud dengan "pendidikan" dari "pendidikan politik" ialah cara bagaimana suatu masyarakat mengalihkan kultur politik dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Cara ini dapat berwujud edukasi formal dan non formal, interaksi sosial, komunikasi sosial ataupun penteladanan. Sedangkan yang dimaksud "politik" dari "pendidikan politik" ialah kultur politik. Kultur politik adalah keseluruhan paduan nilai, keyakinan empirik, dan lambang-lambang ekspresif. Untuk Indonesia yang dimaksud dengan "nilai" ialah nilai-nilai intrinsik yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945.

R. Hajer dalam Kartini Kartono (1989 : 13) menyatakan bahwa, Pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik. Pendidikan politik selalu terkait dengan internalisasi nilai (sherman and Kolker :1987 : 16), suatu proses dengan mana individu mempelajari dan menjadi

bagian dari budaya tersebut sebagai unsur yang penting dari konsep dirinya. Sebagai proses pembudayaan, pendidikan politik terkait dengan nilai-nilai kepercayaan dan pola-pola perilaku yang dipelajari pada usia dini yang membentuk sifat dasar (Idrus Afandi : 1996 : 25).

Sementara itu A. Kosasih Djahiri (1996 :1), memberikan pengertian pendidikan politik sebagai pembinaan siswa sebagai anak manusia Indonesia mampu menjadi warga negara, warga masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang ber-Pancasila dan UUD 1945 dan melek politik. Warga negara yang melek politik menurutnya, adalah warga negara Indonesia yang berkepribadian Pancasila dan melek hukum, melek kehidupan berbangsa dan bernegara, melek masalah dan mau serta mampu berkontribusi memecahkan masalah sesuai dengan fungsi dan perannya.

Mengacu pada kutipan di atas, maka yang dimaksud pendidikan politik dalam penelitian ini, adalah pendidikan yang diarahkan pada upaya *transmisi* dan *transformasi* yang menunjang pembinaan nilai moral Pancasila, khususnya nilai-nilai demokratis kepada peserta didik melalui pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik di tingkat persekolahan.

#### **4. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu program pendidikan yang wajib diberikan pada tiap jenis, jenjang, dan jalur pendidikan di tingkat persekolahan dan berfungsi sebagai wahana untuk mengembangkan dan

melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari siswa.

Perilaku yang dimaksud adalah seperti yang tercantum di dalam penjelasan USPN No. 2 tahun 1989 pasal 39 ayat (2), yaitu :

“Perilaku yang memancarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Menyimak tujuan PPKN di SMU di atas, berarti yang menjadi tuntutan adalah bagaimana nilai-moral Pancasila itu betul-betul dihayati dan diamalkan, lebih jauh lagi dijadikan pedoman dalam perilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga diharapkan mampu membentuk sosok individu atau manusia Indonesia yang utuh harapan di masa depan.

Sedangkan tujuan PPKN ialah untuk membina dan mengembangkan daya nalar, sikap dan perilaku siswa yang bertanggung jawab berlandaskan nilai-moral Pancasila serta mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan belajar untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut dan untuk hidup dalam masyarakat (Kurikulum SMU : 1994).

Mengacu kepada uraian di atas, yang dimaksud Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam penelitian ini adalah program pendidikan nilai-moral yang salah satu fungsinya sebagai pendidikan politik, berfungsi sebagai wahana untuk



membina, mengembangkan, dan melestarikan nilai moral Pancasila sehingga menjadi salah satu andalan pembentuk manusia Indonesia harapan kini dan masa mendatang.

## 5. Pendidikan Umum

Dalam Dictionary of Education (1973 : 250), pendidikan umum diartikan sebagai "Those phases of learning which should be the common experience of all men and women". P.H. Phenix (19654 :5), menyatakan: ".....general education is the process of engendering essential meaning". Pengertian ini didasari bahwa sebagai pribadi yang terpadu dan menyeluruh (whole person) setiap manusia perlu memahami makna essensi.

Pakar lain, yaitu C.H. Faust seperti dikutip oleh T.R Mc Connel dalam Nelson B. Henry (1952 : 4) mengemukakan bahwa "General education appears from this point view to be the preparation of youth to deal with the personal and social problems with which all men in democratic society are confronted".

Alberty and Alberty (1965) berpendapat, bahwa :

"General Education is that part of the program a which is required of all students at a given level on the ground that it is essential to the development of the common values, attitudes, understanding, ang skill needed by all for common democratic citizenship".

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan di atas, dapat difahami bahwa pendidikan umum adalah program pendidikan bagi semua orang (generasi muda) dalam rangka mengembangkan nilai-nilai, sikap, pemahaman, dan keterampilan yang

esensi berkenaan dengan masalah pribadi dan sosial secara terintegrasi dan dibutuhkan oleh semua orang, agar dapat hidup secara memuaskan dalam kedudukannya sebagai pribadi anggota keluarga, pekerja maupun sebagai warga negara dalam masyarakat yang demokratis.

Jadi Pendidikan Umum dalam penelitian ini lebih difahami sebagai suatu pendidikan yang programnya diperuntukkan bagi semua orang pada setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan, yang diarahkan untuk mengembangkan kepribadian secara utuh dan menyeluruh. Yakni membina pemahaman, keyakinan dan sikap perilaku warga negara Indonesia yang baik, yaitu warga negara yang paham dan sadar akan harga diri - tugas - tanggung jawab dan kewenangan ataupun hak dirinya, orang lain, pemerintah dan warga negaranya serta mampu melaksanakannya dalam kehidupan dirinya, dengan lingkungan sesamanya dan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara, atas dasar sistem nilai-moral-norma sosial dan budaya Indonesia.

Berdasarkan definisi operasional seperti diuraikan di atas, maka lingkup penelitian ini yang berjudul **“Implementasi Konsep Pendidikan Politik dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan umum di SMU”** (Studi Naturalistik Pendidikan Nilai - Moral Pancasila di SMU Negeri I Sumedang), adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman guru PPKN tentang konsep pendidikan politik dalam membina nilai moral siswa di sekolah. Seperti pemahaman dasar filosofi, fungsi dan tujuan pendidikan politik.

2. Penerapan konsep pendidikan politik dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, meliputi penerapan pada tahap persiapan dan pelaksanaan KBM.
3. Implementasi pendidikan politik dalam moralita perilaku siswa di lingkungan sekolah.

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

Menurut Bogdan dan Biklen (1987 : 147) bahwa pertanyaan penelitian yang disebutnya sebagai pertanyaan analitik perlu disusun dalam penelitian kualitatif, hal ini diperlukan untuk mengarahkan fokus dalam pengumpulan data dan membantu mengorganisasikannya dalam langkah berikutnya.

Berdasarkan rumusan masalah dan lingkup penelitian yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana pemahaman guru PPKN SMUN I Sumedang tentang konsep pendidikan politik dalam membina nilai-moral di sekolah, Apakah penerapannya dalam PBM sudah sesuai dengan konsep yang dipahaminya, serta bagaimana implementasinya dalam moralita perilaku siswa di lingkungan sekolah?.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pemahaman guru PPKN SMUN I Sumedang tentang konsep pendidikan politik, dan perapannya

dalam kegiatan belajar mengajar PPKN, serta implementasinya dalam moralita perilaku siswa di lingkungan sekolah, sebagai dasar memberikan gambaran alternatif upaya guru membina nilai moral yang sesuai dengan harapan, misi dan fungsinya sebagai pendidikan umum. Tujuan tersebut dijabarkan lagi yakni untuk :

1. Mendeskripsikan pemahaman guru PPKN tentang konsep pendidikan politik dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Umum di tingkat persekolahan. Seperti pemahaman dasar filosofi, fungsi dan tujuan, serta lingkup materi pendidikan politik.
2. Mendeskripsikan penerapan pendidikan politik dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan konsep pendidikan politik yang dipahaminya. Dalam hal persiapan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
3. Mendeskripsikan implementasi pendidikan politik dalam moralita perilaku siswa di lingkungan sekolah.

#### **F. Asumsi Penelitian**

Penelitian ini dilandasi oleh asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangatlah diperlukan dalam rangka pembentukan kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan mewujudkan sosok manusia pembangunan yang berkualitas dan harmonis dalam fungsinya sebagai makhluk Tuhan, makhluk Sosial, makhluk individu serta

memiliki sikap dan wawasan kehidupan yang serasi dan seimbang. Keberadaan PPKN sebagai Pendidikan Umum dapat dilihat dalam pasal 39 UUSPN yang menyatakan bahwa: isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat (a) pendidikan Pancasila, (b) Pendidikan Agama, (c) pendidikan Kewarganegaraan.

2. Misi pokok Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah pendidikan politik. Dalam pengertian pembinaan siswa sebagai anak Indonesia maupun menjadi warga negara, masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia yang berkepribadian Pancasila dan UUD 1945 yang "*melek politik*" (A, Kosasih Djahiri : 19960:1).
3. Melalui program pendidikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan siswa dibina untuk menjadi seorang warga negara dan warga masyarakat Indonesia yang baik dan bertanggung jawab serta mencintai negara dan Bangsaanya. Karenanya "guru menempati kedudukan sentral, sebab peranannya sangat menentukan. Ia harus mampu menterjemahkan nilai-nilai tersebut kepada para siswa melalui kegiatan belajar mengajar di kelas" (Nana Sudjana :1989:1)

#### G. Manfaat Penelitian

Melalui pengkajian konseptual maupun dari temuan-temuan otentik di lapangan, diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran yang bermanfaat baik untuk keperluan teoritis ilmiah, maupun untuk keperluan praktis operasional. Hal ini perlu dilakukan guna lebih memahami persoalan-persoalan nilai-moral dan

pendidikan politik yang ada dalam dunia pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk lebih jelasnya, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Dari studi ini diharapkan dapat memberikan masukan guna memperkaya teori dan memperjelas mengenai arti pentingnya dilakukan pendidikan politik di tingkat persekolahan melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sebagai program pendidikan yang wajib ditempuh oleh semua siswa di semua jenjang, tingkat, dan jalur pendidikan. Yang akhirnya diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan secara praktis dapat bermanfaat bagi :

*a. guru PPKN*, sebagai masukan bagi guru PPKN dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan tugas mengajarnya sehingga dapat memperkecil kemungkinan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan (kurikulum sebagai dokumen) dengan apa yang dilaksanakan (kurikulum sebagai proses) dan apa yang dicapai siswa (kurikulum sebagai hasil). Disamping itu kiranya dapat menjadi titik tolak bagi guru untuk berupaya melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang tidak hanya berisikan pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-moral Pancasila (pendidikan

politik), melainkan pembinaan nilai-moral dalam bentuk moralita perilaku siswa sehari-hari di lingkungan sekolah, di dalam maupun di luar kegiatan PBM.

*b. kepala sekolah*, yaitu untuk turut meningkatkan kepeduliannya terhadap mutu pelaksanaan proses belajar mengajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, artinya kiranya tidak hanya berpuas diri dengan tingginya perolehan Nilai Ebtanas Murni PPKN yang dicapai siswa, melainkan adalah terbinanya perilaku siswa yang baik dan terciptanya suasana yang penuh diwarnai penerapan nilai-nilai demokratis, serta terjalinnya komunikasi yang harmonis diantara berbagai pihak di lingkungan sekolah.

*c. peneliti sendiri*, melalui penelaahan secara konseptual dari berbagai literatur dan pengalaman di lapangan, serta berbagai saran dan arahan dari pembimbing maupun nara sumber lain, menempa penulis menjadi lebih kritis dan tanggap. Sehingga pada akhirnya akan menambah wawasan dan cakrawala berpikir serta kemampuan dalam memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi.

